

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDERAAN
BERMOTOR (PKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

**CANTY MARIA SINAGA
NPM : 09 833 0113**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara

Nama Mahasiswa : Canty Maria Sinaga
No. Stambuk : 09 833 0113

Jurusan : Akuntansi

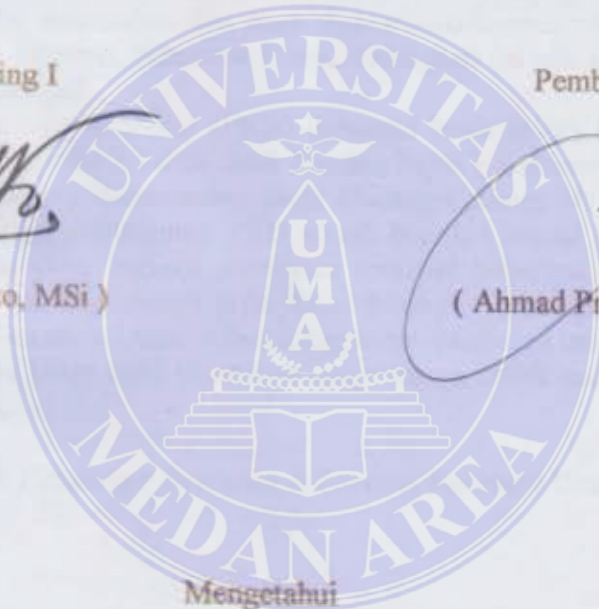
Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(Drs. Rasdianto, MSi)

Pembimbing II

(Ahmad Prayudi, SE,MM)



Ketua Jurusan

(Linda Lores Pulba, SE, MSi)

Dekan



(Prof. Dr. H. Ad Afifuddin, SE, MEc)

Tanggal Lulus :

2013

RINGKASAN

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDERAAN BERMOTOR (PKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama : Canty Maria Sinaga

NPM: 09.833.0113

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara. Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri merupakan salah satu jenis pajak Provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, permasalahan yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen-dokumen yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, sedangkan tehnik analisis dilakukan secara Deskriptif kualitatif.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Pelaksanaannya berdasarkan pada Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Tentang . Pelaksanaan pemungutan PKB sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun terdapat beberapa hambatan teknis dalam pelaksanaan pemungutannya serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Adanya hambatan-hambatan tersebut oleh Samsat di Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul tersebut.

Kata Kunci : “Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara”

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi S-1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area dengan judul : Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara.

Selama dalam penyusunan Skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk sumbangan pikiran, tenaga, motivasi, semangat dan waktu yang tidak terukur dalam menyelesaikan skripsi ini. Banyak pelajaran berharga yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi penulis selama melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini. Keluh kesah, rasa lelah, ketakutan dan kekhawatiran menghadapi hal-hal yang belum pernah dilewati membuat penulis belajar mengenai arti dari perjuangan dan penulis yakin setiap usaha yang dilakukan dengan keikhlasan hati tanpa paksaan tapi karena ada dorongan dari hati yang paling dalam pasti tidak akan ada yang sia-sia

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan trimakasih kepada :

1. Bapak Saliman Sinaga dan Ibu Martha Ulina Girsang, sebagai orangtua penulis, dimana mereka adalah orang yang terhebat yang mampu memberikan

motivasi, semangat yang luar biasa dan Doa, sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan hingga saat ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ya'kub Matondang, MA, sebagai Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Prof. Dr. H. Sya'ad Afifudin, SE, MEd, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Bapak Herry Syahrial, SE, Msi, selaku pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
5. Ibu Linda Lores Purba, SE, Msi, sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
6. Bapak Drs. Rasdianto, Msi sebagai Pembimbing I trimakasih atas masukan dan asaran yang telah disampaikan selama bimbingan.
7. Bapak Ahmad Prayudi, SE, MM sebagai Pembimbing II trimaksih atas bimbingan dan arahan yang telah disampaikan selama ini.
8. Buat Bapak Drs. Zainal Abidin, MH selaku Ketua dalam pelaksanaan Meja Hijau dan Ibu Hj. Rosmaini, SE, MMA selaku sekretaris dalam pelaksanaan Meja Hijau saya sendiri.
9. Buat Pegawai beserta Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah meluangkan waktunya membimbing saya dalam penyelesaian skripsi hingga selesai.
10. Buat seluruh Keluarga besarku yang telah mendoakan dan membimbing saya sendiri hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun sistematika penulisan. oleh karena itu dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhirnya tanpa henti penulis bersyukur kepada Tuhan, karena atas kehendakNya, Skripsi ini dapat diselesaikan, semoga dapat bermamfaat bagi semuanya. Amin

Medan, 25 April 2013

Penulis


Canty Maria Sinaga



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Skema Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar IV.1 Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Suamtera Utara.....	48



DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Mamfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	10
A. Otonomi Daerah.....	10
B. Desentralisasi Fiskal.....	11
C. Penerimaan Daerah.....	13
D. Pendapatan Asli Daerah.....	15
E. Pajak Daerah.....	16
F. PKB sebagai salah satu jenis Pajak Daerah.....	22
G. Bagi Hasil Pajak Daerah.....	26
H. Penagihan dan Pemungutan Pajak Daerah.....	27
I. Mekanisme With Holding Tax.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1	Rincian Waktu Penelitian.....	35
Tabel III.2	Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	37
Tabel IV.1	Daftar Nama Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.....	40
Tabel IV.2	Daftar UPTD di Sumatera Utara.....	49
Tabel IV.3	Perkembangan PAD Sumatera Utara 2006-2009.....	55
Tabel IV.4	Kontribusi Pajak Daerah,Retribusi Daerah terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara.....	55
Tabel IV.5	Potensi Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara 2006-2009.....	57
Tabel IV.6	Perkembangan PKB,Pajak Daerah dan PAD Provinsi Sumatera Utara tahun 2006-2009.....	58
Tabel IV.7	Hasil Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara.....	60



DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II	
LANDASAN TEORITIS.....	10
A. Otonomi Daerah.....	10
B. Desentralisasi Fiskal.....	11
C. Penerimaan Daerah.....	13
D. Pendapatan Asli Daerah.....	15
E. Pajak Daerah.....	16
F. PKB sebagai salah satu jenis Pajak Daerah.....	22
G. Bagi Hasil Pajak Daerah.....	27
H. Penagihan dan Pemungutan Pajak Daerah.....	27
I. Mekanisme With Holding Tax.....	28

	J. Kebijakan Pajak Daerah.....	29
	K. Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III	METODE PENELITIAN.....	34
	A. Jenis,Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
	B. Jenis dan Sumber Data.....	35
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
	D. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
	A. Hasil Penelitian.....	38
	B. Pembahasan.....	54
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional tersebut, maka Pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program pembangunan baik pembangunan jangka pendek maupun program pembangunan jangka panjang. Dan untuk keberhasilan program pembangunan nasional tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit.

Sebelum diadakan *tax reform* di Indonesia, pembangunan nasional selalu mengandalkan sumber dana yang sebagian besar dari sektor minyak dan gas. Namun setelah *tax reform*, Pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Dan dalam kenyataannya penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ketahun semakin meningkat dan sejalan dengan hal tersebut peranan pajak sebagai penopang program pembangunan nasional juga semakin meningkat.

Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakan sebagai Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Mengenai Pajak Daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain – lain, harus ditetapkan dengan Undang – Undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berisi Ketentuan – ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah dan Pajak Nasional, merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan tersebut dapat memberikan beban yang adil bagi seluruh masyarakat.

Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Terutama mengenai obyek dan tarif pajak, sehingga antara Pajak Nasional dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saling melengkapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih,Woro Wirianingtias .**Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset**.Tesis.Universitas Diponegoro. Semarang. 2009
- Hamdani, Aini.H, **Perpajakan** , Edisi Ke lima, Cetakan Kedelapan, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.2004.
- Ikatan Akuntan Andonesia; **Modul Brevet A dan B**; Jakarta; 2008.
- Mardiasmo. **Perpajakan Edisi Revisi 2002**. Andi Yogyakarta, Yogyakarta.2002
- Muhammad Fauzan.**Akuntansi dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan (BPHTB) dan Kontribusinya terhadap PendapatanDaerah Di Kota Semarang Periode Tahun 2008- 2011**.DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING *Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012*.2012.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah**.
- Purwono,Harry. **Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak**.Cetakan Pertama.Penerbit Erlangga. Jakarta.2011.
- Rahayu,Siti Kurnia. **Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal**. Edisi Pertama. Graha Ilmu.Yogyakarta.2010.
- Rahdina,D. P. **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok Pada Era Otonomi Daerah** [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.2008.
- Ruswandi,Rima Rahmawati.**Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang**[skripsi].ITB.Bandung.2009.
- Rosdiana, H, dan R. Tarigan. **Perpajakan: Teori dan Aplikasi**. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.2005.

Saragih, J. P. **Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.** Ghalia Indonesia, Jakarta.2003.

Sari, Anggara Yulia."Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung".**Jurnal Wacana Kinerja** Volume 13 No.2. 2010.

Sinaga, B. M. dan H. Siregar. **Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia.** Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Institut Pertanian Bogor, Bogor.2005.

Soebechi, Imam. **Perda Pajak dan Retribusi Daerah (Judicial Review).** Cetakan ke Tujuh. Sinar Grafika. Jakarta.2010.

Sugiyono. **Penelitian Ekonomi dan Bisnis;** Bandung; CV. Alfa Beta.2010.

Sunarto. **Perpajakan I, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga,** AMUS dan Citra Pustaka, Yogyakarta.2005.

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang –Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Waluyo. **Perpajakan Indonesia;** Jakarta; Penerbit .Salemba Empat. 2010.

www.google.searc.com

Yunus, A.T. **Jurnal Economic Resources, ISSN.0852-1158, Vol.11 No.30, Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bone Bolango Di Provinsi Gorontalo.** 2010.